

1. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah suatu konsep dalam sistem pemerintahan di suatu negara di mana daerah atau wilayah tertentu diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri Sesuai dengan kebijakan serta norma-norma yang tengah berlaku. di tingkat nasional. Otonomi daerah diharapkan agar mengarah ke terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan yang ada di Tengah masyarakat kemudian pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Purwanti & Noviyanti, 2022) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. pemerintah daerah (Pemda) saat ini sangatlah besar dalam mengelola kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan Pemerintah Daerah yang telah diganti dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat merupakan kewajiban pemda yang harus dilakukan secara merata dan adil, dengan mengatur potensi daerah secara optimal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun keuangan.

Pengaruh pendapatan daerah dan kinerja keuangan adalah suatu rangkaian proses perubahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat keadaan agar daerahnya menuju kepada arah yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, Hal ini dapat mengurangi pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat terlaksana. Ini menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

Dengan terlaksananya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini, kinerja keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan keuangan daerah sangat amat penting untuk kemajuan negara. Menurut Mahmudi (2010), “kinerja rasio keuangan dapat digunakan dalam mengukur suatu pencapaian perkembangan kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.” Artinya, semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka akan baik pula pencapaian yang akan di raih oleh pemerintah daerah. Menurut Saraswati (2017), optimalisasi potensi keuangan dipandang penting bagi pemerintah daerah, dikarenakan terdapat peluang untuk menggali perbagi potensi pendapatan lokal.

Tugas utama pemerintah daerah adalah sesuai dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, yaitu kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah. Hal ini berarti pemerintah daerah harus menjalankan otonomi seluasluasnya kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah demi pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengatur bagaimana caranya mengatur sumber-sumber keuangan yang mana agar sesuai dengan program pemerintahan sebagai bentuk dari kewenangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan adalah salah satu bentuk dari tolok ukur kinerja pemerintah yang mana akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah daerah telah mampu memberikan pelayanan umum keuangan yang baik kepada masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai. Menurut Badan Pusat Statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia “keberhasilan kinerja pembangunan manusia disuatu wilayah, dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia melalui penyediaan layanan publik yang baik.” Maka, hal ini berarti, jika semakin baik daerah dalam mengelola keuangannya akan berdampak yang baik pula bagi meningkatkan kehidupan masyarakat.

Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi Jateng dan Nasional Tahun 2014-2020 (y-on-y/%)

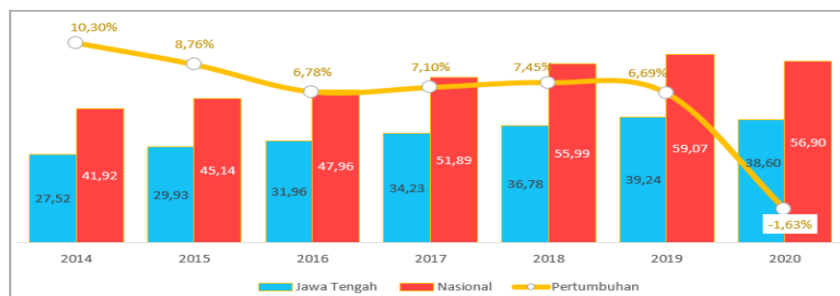


Sumber: BPS. Jateng, Nasional, diolah, Feb 2021

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi, Sumber BPS, Jateng, Nasional, Olah, Feb 2021

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tahun 2014-2019 tumbuh rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Jawa Tengah. Pembatasan aktivitas sosial membuat tendensi melakukan konsumsi menjadi lemah. Selain itu, dengan tingkat permintaan yang rendah, aktivitas produksi menjadi menurun sehingga pendapatan menjadi terbatas. Kinerja perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami pertumbuhan -6,20 persen (c-to-c), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional 2020 yang sebesar -2,07 persen. Secara nominal atau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) PDRB Jateng 2020 mencapai Rp1.348.600,40 miliar dan Rp965.629,09 miliar (ADHK).

Grafik II.5 PDRB Per Kapita Jawa Tengah & Nasional (Jutaan Rp)



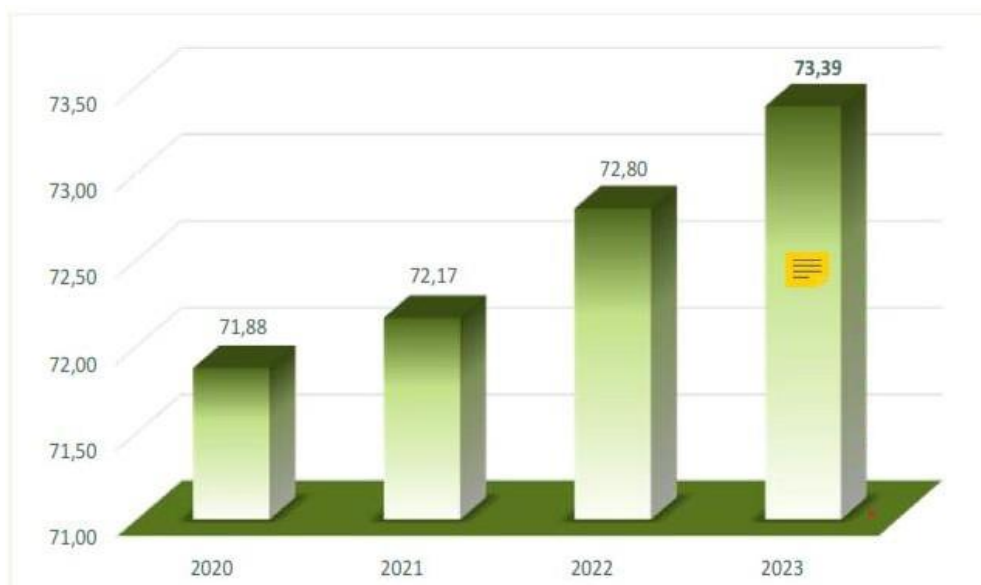
Sumber: BPS. Jateng, Nasional, diolah Feb

Gambar 2. PDRB, Sumber BPS, Jateng, Nasiona, diolah Feb

Trend PDRB perkapita Jawa Tengah dari tahun 2014 s.d. 2019 menunjukkan kenaikan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per kapita akibat adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional yang mencapai Rp 56,90 juta, posisi PDRB per kapita Jawa Tengah masih rendah dengan gap yang cukup jauh dan cenderung konstan. Laju pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita Jawa Tengah dari angka rata-rata nasional. Selama periode 2014 s.d. 2020, PDRB perkapita mengalami penurunan meskipun pada tahun 2018 mulai meningkat lagi namun tahun 2019 kembali turun dan pada tahun 2020

tumbuh sebesar - 1,63 persen. Namun, peningkatan tersebut lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pergerakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan pendapatan per kapita Nasional.

Selain berdampak terhadap kinerja fundamental ekonomi Jawa Tengah, pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat dinilai menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).



Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah, 2020- 2023

Gambar 3: IPM Sumber BPS Prov Jateng 2019-2023,

Dari tabel diatas, Kota Semarang memiliki IPM tertinggi dibandingkan dengan 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai IPM 71,73 pada tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan nilai 71,88, tahun 2021 mengalami kenaikan 72,17, tahun 2022 mengalami kenaikan 72,80 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan 73,39.

Sumber daya akan menjadi bahan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam membiayai daerahnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan demi

mengukur kinerja keuangan daerah. Jika nilai rasio yang baik dari sebuah keuangan daerah, maka alat ukur kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan pemerintah yang berhasil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan tidak bisa hanya mengandalkan keuangan pemerintah pusat jika mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah karena akan banyak digunakan sebagai pengalokasian dana untuk belanja rutin yang malah akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan.

Penelitian ini mengacu pada Jurnal Kekieta et all.,(2024), dan yang membedakan penelitian ini adalah pada peneliti menambahkan variable Y yaitu kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah dimana kinerja keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mengelola keuangannya secara efektif, efisien sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening karena di jurnal terdahulu Adhi Dhian et all., (2023) memiliki hasil yang tidak berpengaruh, yang diambil dari variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai pengaruh pendapatan daerah dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonominya dengan menggabungkan beberapa variabel yang digunakan, dari pendapatan daerah, kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Objek yang digunakan yaitu Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dengan menganalisis laporan keuangan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan daerah dan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat hal tersebut, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting apalagi jumlah penduduk dari setiap daerah kabupaten dan kota akan mempengaruhi peningkatan belanja daerah. Pemerintah daerah harus menentukan dan mempertimbangkan kebutuhan daerah terhadap fasilitas sarana dan prasarana demi memperlancar tugas pemerintah daerah agar memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Berlatar belakang dari itu, peneliti mengkaji bagaimana kinerja pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki daya guna yang signifikan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan untuk merumuskan keputusan dalam mengelola keuangan negara. Maka, jika masyarakat di daerah tersebut ingin maju dan sejahtera, pemerintah daerah harus berdasarkan pemahaman dan motivasi yang melandasi pengalokasian dana mereka dengan baik untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) masyarakat. Dengan mengambil judul 'Pengaruh Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat,' peneliti ingin menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan daerah dan keuangan pemerintah daerah yang mana akan menghasilkan nilai rasio yang baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kajian Pustaka

2.1. Theory Harrod-Domar

Model ini menyatakan bahwa tidak ada alasan alami bagi ekonomi untuk memiliki pertumbuhan yang seimbang. Model ini dikembangkan secara independen oleh Roy F. Harrod pada tahun 1939, dan Evsey Domar pada tahun 1946, meskipun model serupa telah

diusulkan oleh Gustav Cassel pada tahun 1924. Menurut teori yang tertulis di dalam Rapanna, dkk (2017) di dalam buku Ekonomi Pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses meningkatnya pendapatan dan tidak mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Biasanya pertumbuhan ekonomi diterapkan pada ekonomi yang sudah mengalami peningkatan pendapatan perkapita.

Teori yang akan digunakan merupakan dari gabungan dari teori mengenai pertumbuhan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

Teori *Harrord-Domar* dan *Rostow* adalah teori yang menjelaskan bagian dan tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Teori *Harrord-Domar* dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mereka percaya bahwa teorinya dapat memperkuat tabungan nasional. Hal ini berarti bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah *capital stock* yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori *Harrord-Domar* dan *Rostow* mempercayai bahwa tingkat tabungan dan *capital stock* yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun faktor lain mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti kualitas SDM dan infrastruktur pendukung (Todaro : 2006).

Teori *Harrord-Domar* (dalam Sadono, 2015: 435) digunakan sebagai syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang lama. Dalam analisisnya *Harrod-Domar* menunjukkan bahwa misalnya di dalam suatu tahun tertentu barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh. Maka, pengeluaran agregat dalam tahun 2002 yaitu $AE = C + I$. Hal ini akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya. Dengan kata lain, investasi yang berlaku dalam tahun sebelumnya akan menambah kapasitas barang modal pada jasa dan barang di tahun selanjutnya. Maka, *Harrord-Domar* mengemukakan persoalan dan apa saja syarat yang perlu dipenuhi supaya barang modal dapat bertambah dan dapat digunakan sepenuhnya di tahun selanjutnya. Hal ini adalah syarat yang perlu dipenuhi supaya barang-barang modal mencapai kapasitas penuh kembali.

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Mathius (2016: 5) *agency theory* yang membuat teori keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak). dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal itu dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Kaitan *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (*prinsipal*) dengan pemerintah daerah (*agen*). Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai *prinsipal* telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi sumber Pendapatan 11 Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

2.4 Kesejahteraan masyarakat

Menurut Mulia & Saputra (2020), kesejahteraan masyarakat merupakan berfokus pada bidang *social* yang pada dasarnya merupakan keadaan sosial masyarakat negara tersebut. Memiliki kesejahteraan yang tinggi akan memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan *social*. Hal ini sesuai dengan hakekat dan martabat manusia yang mana mereka harus mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan sesamanya sendiri tanpa harus melibatkan atau mengganggu orang lain disaat mereka melakukan proses tersebut.

Kesejahteraan adalah indeks yang dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup mereka masing-masing. Biasanya, menurut masyarakat umum, orang yang sejahtera adalah mereka yang berhasil sekolah dengan tinggi dan jauh. Mereka mampu menyekolahkan anggota keluarganya pun karena jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera. Hal ini lantaran mereka percaya bahwa pendidikan akan memberikan timbal balik yang cepat pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Maka dari itu, kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Di Indonesia, data BPS, masih terdapat sekitar 28 juta orang atau 10,8% penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya. (Mulia & Saputra, 2020)

2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Menurut pandangan Adam Smith, pengembangan hak milik, spesialisasi dan pembagian kerja merupakan faktor-faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis (Arsyad: 2016)

Menurut Todaro (2000) ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat, yaitu;

- a. Akumulasi modal termasuk persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi dan stok modal sebagai merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal.
- b. Pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan angka kenaikan kerja secara tradisional dianggap dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.
- c. Kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional.

Selain tiga *factor* diatas, tentunya sumber daya alam dan organisasi daerah menjadi dua *factor* lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika kondisi keduanya memadai dan melimpah menjadi hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan proses pertumbuhan produksi dalam kegiatan ekonomi. Semua harus melengkapi modal, dan membantu meningkatkan produktifitas dengan melakukan pembaharuan (inovasi) di daerahnya.

2.5 Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa: “*Kinerja keuangan dalam organisasi sektor publik berkaitan dengan prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih baik.*” Ia menambahkan bahwa bentuk dari akuntabilitas yang baik adalah ciri-ciri dari terapan *good governance* yang bagus karena ini bukan hanya sekedar memberikan informasi tentang bagaimana tetapi cara uang *public* tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam proses bagaimana pengukuran kinerja keuangan sudah berhasil, biasanya dinilai tercapai tidaknya tujuan perusahaan.

Penilaian kinerja menurut IAI (2012:25) digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran lain atau imbalan (*return on investment*) dan penghasilan persaham (*eaming pershare*). Ini berkaitan dengan pengukuran bersih (laba) sebagai penghasilan dan beban dan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan. Informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan digunakan untuk melihat apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi maka perusahaan menanamkan kinerja.

Bastian (2017, dalam Andaspri, 2019) juga menyebutkan beberapa *indicator* dari tujuan kinerja sendiri adalah untuk memperjelas apa, berapa dan kapan fungsi dan peranan dalam kegiatan dilaksanakan. Sehingga, dipercaya bahwa hal ini dapat meningkatkan *consensus* yang dibangun oleh berbagai pihak terkait demi menghindari kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan kegiatan pada saat melakukan penilaian. Beberapa hal lainnya adalah membangun dasar dari pengukuran seperti analisis, dan evaluasi kinerja organisasi dan unit kerja.

2.7 Penelitian Terdahulu

Table 1 Penelitian Terdahulu

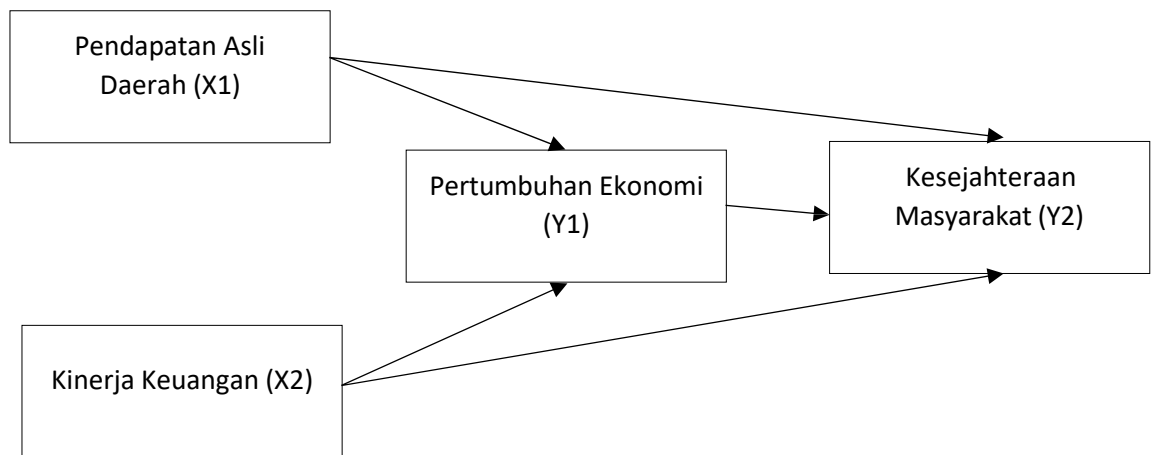
No	Pengarang	Judul	Isi
1.	Aziz Septiatin, Mawardi dan Mohammad Ade Khairur Rizki (2018)	Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	inflasi dan pengangguran yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia di tahun 2011 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan analisi ordinary laeast square (OLS). Variable bebas (Y) nya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan variabel terikat (X) nya adalah pengangguran dan inflasi. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa

			inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Pengangguran berpengaruh positif jadi jika pengangguran bertambah, pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami kenaikan.
2.	Fasholla, R.T (2018)	Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan DI Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap. Dengan metode analisis data panel dan kombinasi antara data time series dan cross section kesimpulannya adalah belanja daerah dan jumlah penduduk sangat berpengaruh dan berhubungan positif. Namun, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Cilacap
3.	Berliani, (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka.	Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka.
4.	Rinova & Dewi, (2019)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran Di Pulau Sumatera)	Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran di Pulau Sumatera. Kinerja keuangan diukur dengan rasio keuanggan.
5	Adhi Dhian et all., (2023)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening.	Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah periode tahun 2018–2021, Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah periode tahun 2018–2021, Rasio pertumbuhan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah tahun periode tahun 2018–2021, Pertumbuhan ekonomi tidak

			berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah periode tahun 2018–2021, Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah baik melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, Rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, Rasio pertumbuhan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.
6.	Rita Irviani et al., (2017)	Pengaruh Pendapatan Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.	Perndapatan daerah dan kinerja ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupatn/Kota Provinsi Lampung. Dengan kata lain bahwa pendapatan ekonomi dan kinerja keuangan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
7.	Syamsudin, Cahya, dan Dewi (2015)	Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan.	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ekskaresidenan Surakarta. Semakin besar PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah serta semakin kecil pinjaman dan bantuan pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut. Semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan.
8.	Hariyani (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.	pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia yang dilaksanakan secara memadai, Rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi, sedangkan pada rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD

			Provinsi Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi.
9.	Suci Nurulita, Hamdani Arifulsyah, Yefni (2018)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau.	Tidak ada pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efektivitas Terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Ada pengaruh rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi.
10.	Suci Nurulita, Hamdani Arifulsyah, Yefni (2018)	Analisis Pengaruh Financial Performance Terhadap Unemployment Rate Dengan Economic Growth Sebagai Variabel Intervening Pada Pemda Provinsi Di indonesia	Terdapat pengaruh tidak langsung antara rasio efektivitas dan efisiensi penerimaan pemerintah provinsi terhadap Unemployment Rate melalui economic growth di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh tidak langsung rasio kemandirian pemerintah provinsi terhadap Unemployment Rate melalui economic growth di Indonesia.

2.8 Model penelitian



Gambar 4.

Model Penelitian Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

2.9 Hipotesis

Hipotesis 1 :

Berdasarkan penelitian dari Setyowati dan Suparwati (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, PAD dapat digunakan untuk pembangunan jalan raya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar. Pembangunan fasilitas kesehatan dapat bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, dimensi umur panjang dan sehat dalam IPM dapat tercapai dengan pembangunan fasilitas kesehatan. Maka dari itu

penulis menguji kembali apakah PAD memiliki pengaruh dalam pertumbuhan IPM melalui belanja modal. Berdasarkan argument tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Kesejahteraan Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable mediasi/ intervening.

Hipotesis 2 :

Sesuai dengan teori *Hrrord-Domar*, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses untuk meningkatkan pendapatan dan tidak mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Maka hipotesis kedua yakni kinerja keuangan pemerintah secara positif menghasilkan pengaruh baik untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, merujuk dari teori kesejahteraan dari pertumbuhan ekonomi sesuai dengan teori dari SDGs yang ketiga yakni hubungan pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka tingginya pendapatan daerah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tetapi, jika pendapatan daerah yang rendah akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah maka akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah juga. Berdasarkan argument tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Kinerja Keuangan berpengaruh positif pada Kesejahteraan Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable mediasi/ intervening.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2012), penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya dengan menjelaskan hubungan, perbedaan serta pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Pada penelitian kuantitatif, objek penelitian yaitu menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan dengan menggunakan angka.[Creswell, J. W. (2012) *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th. teorj. Achmad Fawaid. Yogyakarta] Hipotesis menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel demi mengetahui apakah sesuatu variabel saling berkaitan atau tidak dengan variabel lainnya dan apakah variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis pengaruh pendapatan daerah dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2023.

Metode penelitian ini mengutamakan kemampuan analisis terhadap data numerik yaitu angka yang kemudian diolah menggunakan teknik perhitungan pengujiannya kuantitatif, data sekunder, analisis regresi linier berganda (Azwar, 2015).[Azwar,S. (2015). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.] Metode ini menggunakan desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian korelasional. Tujuannya adalah karena desain ini cocok dan berfungsi untuk memeriksa dan menggambarkan asosiasi serta hubungan atau kaitan antar variabel (Bordens & Abbotts, 2011).[Abbott, B. B., & Bordens, K. S. (2011). *Research design and methods: A process approach*. (8th Ed.). New York: NY]. Variabel bebas dari penelitian ini adalah kualitas dari pengaruh pendapatan daerah dan kinerja keuangan dan variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2023.

3.1 Populasi

Menurut Uma dan Roger (2016), populasi adalah seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin diteliti. Total dari semua elemen populasi biasanya terbagi dalam beberapa seperangkat karakteristik. Populasi adalah tujuan dari sebagian besar proyek riset demi memperoleh informasi tentang karakteristik dari suatu populasi dengan cara mengambil sensus dan juga sampel. Setelah melakukan pengambilan data, hasil dari populasi digunakan untuk pengambilan keputusan. Populasi yang sudah digunakan untuk pengambilan keputusan untuk analisis nantinya digunakan untuk pengujian hipotesis. Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang akan diteliti baik. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Maka, dari pengertian populasi di atas, populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja dalam mengusahakan kinerja keuangan dan pendapatan daerah demi meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.[Sekaran, U., & Roger, B. (2016). *Research methods for Business* Edisi 4. Buku 2.Jakarta: Wiley.]

3.2 Sampel

Sampel merupakan pilihan dari populasi yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang diambil. Sampel harus benar-benar mewakili populasi. Indikator penting dalam pengujian desain sampel adalah seberapa baik sampel mewakili karakteristik populasi karena sampel pun merupakan bagian dari populasi (Sekaran & Bougie, 2016).[Sekaran, U., & Roger, B., (2016).

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*. *Non probability sampling* terdiri dari purposive sampling. Menurut Sugiyono (2019), Purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini biasanya dilakukan dengan cara memilih secara cermat siapa saja yang layak dijadikan sebagai sampel oleh peneliti dengan mengambil objek penelitian yang mempunyai ciri-ciri kriteria spesifik. Pada penelitian ini menggunakan sampel dengan total 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mana terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Definisi operasional dan pengukuran

Table 2 Definisi Operasional dan Pengukuran

No.	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1.	Pendapatan Daerah	Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1	Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Pendapatan asli daerah meliputi:2. Pajak daerah;3. Retribusi daerah;4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

		(satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.	dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2.	Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya oprasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Irham (2012), Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK (standar akuntansi keuangan) atau GAAP (generally accepted accounting principle) dan lainnya.	Menurut Halim (2007:2003) penilaian tersebut menggunakan analisis rasio laporan keuangan dengan menggunakan tiga indikator (kemandirian, efektivitas, dan keserasian). enurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi dapat didefenisikan sebagai sebuah acuan yang bisa di manfaatkan agar dapat mengevaluasi efisiensi dan efektifitas dari aktifitas ekonomi dengan tujuan untuk menambah nilai pendapatan masyarakat selama periode tertentu (Nurwahida et al., 2022, hal. 1). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis	1. Produk domestic Bruto (PDB), atau Pendapatan atau output perkapita. Dimana PDB Merupakan total nilai pasar (total market value) dari barang barang akhir dan jasa-jasa (final goods and service) yang dihasilkan di dalam suatu

		tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu Negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi melibatkan produksi barang atau jasa di semua sektor ekonomi (Imsar et al., 2022, hal. 2)	perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang selama ini di hadapi (Ruslan, 2016, hal. 208).
4.	Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan masyarakat merupakan komponen penting dalam pola pembangunan ekonomi, dan keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan alat yang memberikan arah atau data untuk mengukurnya. (Berry Sastrawan et al., 2024)	1. instrumen pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Rahmat Syam dan Nurmah, 2020:97-108)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Uma dan Roger (2016), data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan berupa variabel, simbol atau konsep yang bisa mengasumsikan salah satu dari seperangkat nilai. Uma dan Roger (2016) menulis bahwa data sekunder adalah data yang sudah ada dan tidak dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data sekunder dalam analisis ini pun didukung dari beberapa informasi yang telah diperoleh dari website BPS Jateng dengan DJPK, bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan adalah dengan menggunakan perhitungan yang melalui proses olah data. Nantinya, variabel-variabel yang telah dihitung tersebut diolah dengan software Statistical Product and Service Solution (SPSS). Setelah itu, olahan akan menghasilkan perhitungan yang memberikan hasil sebagai pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Adapun metode-metode yang digunakan untuk mengolah data adalah dengan analisis regresi linier berganda.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengolahan data yang digunakan untuk memberikan gambaran atau data yang dikumpulkan dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan Gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rat (mean), standar deviasi, varian, maksimum, sum, range, kemencengan dsistributive (kurtosis dan Skewness) (Ghozali, 2018)

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2021) Uji normalitas adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah sekelompok data mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah salah satu asumsi penting dalam berbagai teknik analisis statistik, termasuk regresi linier dan analisis varian. Imam Ghozali menekankan pentingnya uji normalitas dalam analisis statistik untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis. Jika data tidak berdistribusi normal, maka peneliti perlu mempertimbangkan transformasi data atau menggunakan metode analisis yang tidak bergantung pada asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Imam Ghozali 2021: 178).

3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independent. Pada uji ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF) (Imam Ghozali 2021: 157).

3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk menguji hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen (Ghozali, 2018) Penelitian ini menggunakan model analisis linier berganda untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dengan alat analisis statistika yang didukung dengan software SPSS. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan

Y_1 : Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 : Kesejahteraan Masyarakat

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Kinerja Keuangan

α : Konstanta

β : Beta

e : Error (Kesalahan)

3.5.6 Uji Keباikan model

1. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan nilai *Adjusted R Square* dikarenakan adanya bias terhadap jumlah variabel independen dalam penggunaan R^2 . Nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun dengan penambahan variabel independen, tidak seperti nilai R^2 yang selalu meningkat jika ada penambahan variabel. Jika *Adjusted R Square* bernilai negatif, maka nilai tersebut dianggap nol, yang berarti bahwa variabel independen tidak mampu menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen.

2. Uji F

Menurut Ghozali (2018), uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh atau berhubungan linier terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi $F < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Apabila hasil tingkat signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti model regresi tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen..

3.5.7 Uji Hipotesis

Imam Ghozali (2021): Uji hipotesis adalah proses yang digunakan untuk menentukan apakah asumsi atau pernyataan tertentu tentang parameter populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Uji ini melibatkan langkah-langkah seperti penetapan hipotesis nol dan alternatif, pemilihan tingkat signifikansi, penghitungan statistik uji, dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai p atau hasil statistik lainnya.

1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual (parsial) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya dengan tingkat probabilitas 0.05. Jika nilai menunjukkan nilai probabilitas $\text{Sig.} > 0,05$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika hasil Uji t menunjukkan nilai probabilitas ($\text{sig.} < 0,05$), artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel depende (Ghozali,2018).

2. Analisis Jalur (Path Analysis)

Menurut Ghozali (2018), path analysis digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui pengaruh dari variabel dependen dan independen terhadap variabel *intervening*. Teknik analisa data dari penelitian ini adalah bagian untuk mengubah data hasil penelitian menjadi satu kesimpulan dari hitungan yang tepat. Dengan adanya perhitungan yang tepat dapat mengambil kesimpulan secara deskriptif dari data perhitungan. Hasil dari hipotesis data yang sudah dihitung ini merupakan bagian penelitian dari olahan data *software* SPSS.